

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDUK : 10/1058

NOMOR KLAS. : 348.034 M

ASAL : B / (S) / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 065/J.A/6/1992

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTEMUAN BERKALA
PELAKSANAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KE III TAHUN 1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum adalah merupakan bagian yang penting dari Pembangunan Hukum Nasional dalam upaya pembaharuan Hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum;

b. bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, membina hubungan kerjasama dengan badan-badan penegak hukum dan pengadilan serta badan negara atau instansi lainnya dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman untuk ikut serta membantu peningkatan, penelitian dan pelaksanaan SJDI Hukum berupa penyelenggaraan Pertemuan Berkala ke- III Tahun 1992;

c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Rapat Pembahasan Tahunan Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 1992, Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah penyelenggara Pertemuan Berkala Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke III Tahun 1992;

d. bahwa untuk penyelenggaraan Pertemuan Berkala Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke III Tahun 1992 tersebut, perlu membentuk panitia dan menunjuk peserta pertemuan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) 1989/1990 - 1993/1994;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/M Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Lokakarya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 1978 yang menunjuk Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman sebagai Pusat Jaringan.
 2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nomor: G-HD.01.05-57 tanggal 12 Februari 1992 perihal Pertemuan Berkala Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyelenggarakan Pertemuan Berkala Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke III Tahun 1992 pada tanggal 7 dan 8 Juli 1992 di Jakarta.
- KEDUA** : Tema Pertemuan Berkala ke III Tahun 1992 tersebut adalah "Peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Proses Pengambilan Keputusan dan Tugas Penegakan Hukum".
- KETIGA** : Membentuk Panitia Pertemuan Berkala III Tahun 1992 dengan susunan organisasi seperti tercantum dalam Lampiran I.
- KEEMPAT** : Peserta Pertemuan Berkala ke III Tahun 1992 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Kehakiman RI;
2. Sdr. Wakil Jaksa Agung;
3. Sdr. Para Jaksa Agung Muda;
4. Sdr. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman;
5. Sdr. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Juni 1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G I H, S H.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I.

NOMOR : KEP- 065 /J.A/6/1992

TANGGAL : 16 JUNI - 1992

**PANITIA PERTEMUAN BERKALA
PELAKSANAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KE III
TAHUN 1992**

JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA / PANGKAT /NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
Penasehat	1. Prof.Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.	Undangan dan penceramah.
	2. Soehadibroto, SH	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Undangan dan penceramah.
Ketua Umum	Ny. Kuswantyo Tami Haryono, SH Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 040008172	Kepala Pusat Dokumentasi Hukum BPHN	
Ketua I	Soegeng S. Marsigit, SH Jaksa Utama Madya (IV/d) Nip. 230004291	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejaksaan Agung.	
Ketua II	Djenal Achmad, SH Jaksa Utama Madya (IV/d) Nip. 230004480.	Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung.	
Sekretaris I	Wiratmo Dianggoro, SH Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 040013293	Sekretaris BPHN.	
Sekretaris II	Ny. Indrati Asta Dewi Marsidi, SH Pembina (IV/a) Nip. 040029728	B P H N.	Merangkap peserta.
Bendahara I	Santoso Wiwoho, SH Jaksa Utama Madya (IV/d) Nip. 230007634	Kepala Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak Kejaksaan Agung.	
Bendahara II	Nandi Widayani, SH Ajun Pustakawan (III/b) Nip. 040048365	Staf Bidang Informasi Hukum Pusat Dokumentasi Hukum BPHN.	

JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
PANITIA PENYE- LENGGARA.			
Ketua	Santoso Wiwoho, SH Jaksa Utama madya (IV/d) Nip. 23007634	Kepala Direktorat Pe- mulihan dan Perlin- dungan Hak Kejaksaan Agung.	
Wakil Ketua	H.A.S. Natabaya, SH. LLM Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 130232478	Kepala Pusat Pembi- naan Sistem dan Pra- nata Hukum BPHN.	Merangkap peser- ta dan pemandu.
Persidangan	1. Damsir Anas, SH Pembina (IV/a) Nip. 040028738 2. K u s n a n d a r Muda Wira TU. (III/b) Nip. 230011349 3. Andre Abudaud Senaga, BBA Penata Muda (III/a) Nip. 040018387	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perleng- kapan BPHN. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Per- pustakaan Kejaksaan Agung. Staf Sub Bidang Ja- ringen Hukum Pusat Dokumentasi Hukum BPHN.	Merangkap peser- ta.
Protokol	1. Ny. Made Pudjiastuti Madya Wira TU. (III/c) Nip. 230010158. 2. Ninik Hariwanti, SH Penata Muda Tk.I (III/b) Nip. 040049845 3. Indyah Respati, Sm.Hk. Ajun Pustakawan Madya (III/a) Nip. 040032911. 4. Emanuel Ahmad Yuana Darma TU (II/a) Nip. 230020652 5. Esther P.T. Sibuea Yuana Darma TU (II/a) Nip. 230020658 6. Harry Sucipto Yuana Darma TU (II/a) Nip. 230022253.	Kepala Sub Bagian Protokol Kejaksaan Agung. Staf Bidang Pengum- pulan dan Pengolahan Data Pusat Dokumen- tasi Hukum BPHN. Staf Bidang Pengum- pulan dan Pengolahan Data Pusat Dokumen- tasi Hukum BPHN. Staf Bagian Humas dan Protokol Kejaksa- an Agung. Staf Bagian Humas dan Protokol Kejaksa- an Agung. Staf Bagian Humas dan Protokol Kejaksa- an Agung.	Pembawa Acara. Pembawa Acara. Merangkap pe- serta.

JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
Perlengkapan	1. Bachtiar Darwis Madya Wira TU (III/c) Nip. 230010783. 2. A.M. Adransa Penata (III/c) Nip. 040018412	Kepala Sub Bagian Angkutan Kejaksaan Agung. Kepala Sub Bidang Pelayanan Teknis Pu- sat Dokumentasi Hu- kum BPHN.	
Konsumsi	Ny. H. Harprileny Bareno, SH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 230010169	Kepala Bagian Per- pustakaan Kejaksaan Agung	Merangkap peserta.
Perjalanan	1. Andre Abudaud Senaga, BBA Penata Muda (III/a) Nip. 040018387 2. P a i n o Asisten Pustakawan (II/c) Nip. 040031909	Staf Sub Bidang Ja- aringan Hukum Pusat Dokumentasi Hukum BPHN. Staf Bidang Pengum- pulan dan Pengolahan Data Pusat Dokumen- tasi Hukum BPHN.	Merangkap peserta
Hubungan Masyara- kat, Dokumentasi dan Pameran.	1. Soeparman, SH. MH Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 230010969 2. Abdurrachman Sena Wira TU (III/d) Nip. 230005920 3. Soehandojo, SH Jaksa Pratama (III/c) Nip. 230009258 4. Drs. Eddy Djunaedi Ajun Pustakawan Madya (III/a) Nip. 040028326 5. S u g i y o n o Pengatur Tk.I (II/d) Nip. 040028326.	Kepala Bagian Hu - bungan Masyarakat dan Protokol Kejaksa- an Agung. Kepala Sub Bagian Publikasi Kejaksaan Agung. Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lem- baga Kejaksaan Agung Staf Sub Bagian Ja- aringan Hukum Pusat Dokumentasi Hukum BPHN. Staf Sub Bidang Pu- blikasi BPHN.	Merangkap peserta Merangkap peserta.
Pembantu Umum/ Penghubung	1. Pratomo Hadiwidjojo, SH Jaksa Utama Muda (IV/c) Nip. 230004876 2. Sufendie, SH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 08002359	Kepala Bagian Ran- cangan Peraturan Per- undang-undangan Ke- jaksaan Agung. Kepala Sub Bagian Pe- nyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan Kejaksaan Agung.	Merangkap peserta

JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
	3. Syarif Nasuiton, SH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 230011281	Kepala Sub Bagian Data Peraturan Per- undang-undangan Ke- jaksaan Agung.	
	4. Lukman Karanji Jaksa Muda (III/d) Nip. 230005067	Kepala Sub Bagian Pengkajian Kejaksaan Agung.	
	5. Bambang Suprih Asmoro, SH Penata Tk.I (III/d) Nip. 040041524	Kepala Sub Bagian Ja- aringan Hukum Pusat Dokumentasi Hukum BPHN.	
	6. Soehandojo, SH Jaksa Pratama (III/c) Nip. 230009258	Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lem- baga Kejaksaan Agung	
Manajemen Administrasi	1. S u n a r d i Ajun Pustakawan Muda (II/d) Nip. 040029936	Staf Sub Bidang Ja- aringan Hukum Pusat Dokumentasi Hukum BPHN.	Merangkap peserta.
	2. P a i n o Asisten Pustakawan (II/c) Nip. 040031909	Staf Bidang Pengum- pulan dan Pengolahan Data Pusat Dokumen- tasi Hukum BPHN.	Merangkap peserta
	3. P u l a r j o n o Pengatur (II/c) Nip. 040035878	Staf Bidang Pengum- pulan dan Pengolahan Data Pusat Dokumen- tasi Hukum BPHN.	
	4. M u g i y a t i Pengatur Muda Tk.I (II/b) Nip. 040029936	Staf Sub Bidang Ja- aringan Hukum Pusat Dokumentasi Hukum BPHN.	
Keamanan	1. Lukman Naam, SH Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 230009347	Kepala Bagian Kea- manan Dalam Kejak- saan Agung.	
	2. Soekarno Muchtar Jaksa Pratama (III/c) Nip. 230007839	Kepala Sub Bagian Keamanan Kejaksaan Agung.	
	3. Soejadi, SH. CN Jaksa Madya (IV/a) Nip. 230001471	Kepala Sub Bidang Laporan PUSOPSIN Kejaksaan Agung.	

JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
PANITIA PENYIAPAN MATERI.	4. H.Z. Arifin Rifadin, SH Jaksa Muda (III/d) Nip. 230007524	Kepala Sub Bidang Fotografi dan Identifikasi PUSOPSIN Kejaksaan Agung.	
	5. H. Soenarto Soentoro, SH Ajun Jaksa Madya (III/b) Nip. 230010968	Kepala Sub Bidang Statistik dan Pemetaan PUSOPSIN Kejaksaan Agung.	
	Moh. Hasan Wargakusumah, SH Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 130177074.	Kepala Pusat Perencanaan Hukum BPHN.	Merangkap peserta.
	Isban Burhanuddin, SH Jaksa Utama Madya (IV/d) Nip. 230003562	Kepala Direktorat Perdata Kejaksaan Agung.	
	Ny. L. Sumartini, SH Pembina Tk.I (IV/b) Nip. 040018419	Kepala Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Pusat Dokumentasi Hukum BPHN.	
Ketua I			
Ketua II			
Sekretaris I			
Sekretaris II	Bambang Waluyo, SH Jaksa Pratama (III/c) Nip. 230017577	Peneliti/Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada PUSLITBANG Kejaksaan Agung.	Merangkap peserta.
Anggota	1. M.U. Situmeang, SH Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 230005693	Kepala Bagian Penelitian dan Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung.	Merangkap peserta.
	2. Ny. Sulastri Helmi, SH Pembina (IV/a) Nip. 040028693	Kepala Bidang Informasi Hukum Pusat Dokumentasi Hukum BPHN.	
	3. I Gusti Ngurah Widja, SH Penata Tk. I (III/d) Nip. 040030614	Kepala Bidang Publikasi dan Pelayanan Teknis Pusat Dokumentasi Hukum BPHN	
	4. Ny. S.M. Simandjuntak, SH Jaksa Muda (III/d) Nip. 230010765	Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung.	

JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
Notulen	1. Tana Mantiri, SH Pustakawan Pratama (III/c) Nip. 040041530 2. Mustafa Aris, SH Pustakawan Pratama (III/c) Nip. 040029729 3. Nandi Widyani, SH Ajun Pustakawan (III/b) Nip. 040048365 4. Drs. Aat Supriawijaya Ajun Pustakawan (III/b) Nip. 040049509 5. Drs. Abdullah Empi Ajun Pustakawan Madya (III/a) Nip. 040035661	Staf Sub Bidang Ja- ringan Hukum Pusat Dokumentasi Hukum BPHN. Staf Bidang Informasi Hukum Pusat Doku- mentasi Hukum BPHN Staf Bidang Informasi Hukum Pusat Doku- mentasi Hukum BPHN Staf Sub Bidang Publikasi dan Pela- yanan Teknis Pusat Dokumentasi Hukum BPHN. Staf Sub Bidang Pu- blikasi dan Pelayanan Teknis Pusat Dokumen- tasi Hukum BPHN	Merangkap pe- serta. Merangkap pe- serta. Merangkap pe- serta. Merangkap pe- serta. Merangkap pe- serta.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I.

NOMOR : KEP- 065/J.A/6/1992

TANGGAL : 16 JUNI - 1992

PESERTA PERTEMUAN BERKALA
PELAKSANAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KE III
TAHUN 1992

NOMOR URUT:	NAMA JABATAN	NAMA BADAN	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Hukum	Departemen Dalam Negeri.	
2.	Kepala Biro Organisasi	Departemen Luar Negeri	
3.	Kepala Biro Hukum	Departemen Pertahanan dan Keamanan	
4.	Direktur Perundang-undangan	Departemen Kehakiman	
5.	Kepala Biro Hukum	Departemen Penerangan	
6.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Departemen Keuangan	
7.	Kepala Biro Hukum	Departemen Perdagangan	
8.	Kepala Biro Hukum dan Organi- sasi	Departemen Koperasi	
9.	Kepala Biro Hukum dan Organi- sasi	Departemen Kehutanan	
10.	Kepala Biro Hukum dan Organi- sasi	Departemen Pertanian	
11.	Kepala Biro Hukum dan Organi- sasi	Departemen Perindustrian	
12.	Kepala Biro Hukum	Departemen Pertambangan dan Energi	
13.	Kepala Biro Hukum	Departemen Pekerjaan Umum	
14.	Kepala Biro Hukum dan Kerjasa- sama Luar Negeri	Departemen Perhubungan	
15.	Kepala Biro Hukum dan Organi- sasi	Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	
16.	Kepala Biro Hukum	Departemen Tenaga Kerja	
17.	Kepala Biro Hukum dan Organi- sasi	Departemen Transmigrasi	
18.	Kepala Biro Hukum dan Hu- bungan Masyarakat	Departemen Kesehatan	
19.	Kepala Biro Hukum dan Hu- bungan Masyarakat	Departemen Agama	
20.	Kepala Biro Hukum dan Hu- bungan Masyarakat	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.	
21.	Kepala Biro Hukum dan Hu- bungan Masyarakat.	Departemen Sosial	
22.	Kepala Biro Data dan Analisa	Dewan Pertimbangan Agung	

NOMOR URUT:	NAMA JABATAN	NAMA BADAN	KETERANGAN
23.	Direktur Hukum dan Peradilan	Mahkamah Agung	
24.	Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Badan Pemeriksa Keuangan	
25.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Dewan Perwakilan Rakyat	
26.	Kepala Dinas Undang-Undang BABINKUM ABRI	Markas Besar ABRI	
27.	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bank Indonesia	
28.	Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat Kabinet	
29.	Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan	Badan Administrasi Kependudukan Negara	
30.	Kepala Biro Hukum dan Klaim	Badan Urusan Logistik	
31.	Kepala Biro Agama dan Hukum	BAPPENAS	
32.	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	
33.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.	B.P.P. Teknologi	
34.	Kepala Biro Hukum	Badan Pertanahan Nasional	
35.	Kepala Biro Hukum	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	
36.	Kepala Biro Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	
37.	Kepala Biro Pemasyarakatan dan Kerjasama Sains dan Teknologi	Badan Tenaga Atom Nasional	
38.	Kepala Biro Dokumentasi dan Penerangan	B.P7.	
39.	Kepala Pusat Informasi Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara	
40.	Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	
41.	Sekretaris	Badan Koordinasi Penanaman Modal	
42.	Sekretaris	Biro Pusat Statistik	
43.	Sekretaris	BAKOSURTANAL	
44.	Sekretaris	Arsip Nasional	

NOMOR URUT:	NAMA JABATAN	NAMA BADAN	KETERANGAN
45.	Sekretaris	Perpustakaan Nasional	
46.	Sekretaris	Menteri Negara KLH	
47.	Sekretaris	Menteri Negara Pemuda dan Olahraga	
48.	Sekretaris	Menteri Negara Perumahan Rakyat	
49.	Sekretaris	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita	
50.	Sesdalopbang	SESDALOPBANG	
51.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I D.I. Aceh	
52.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Sumatera Utara	
53.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Sumatera Barat	
54.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Riau	
55.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Jambi	
56.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Sumatera Selatan	
57.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Lampung	
58.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Bengkulu	
59.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I DKI Jakarta	
60.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Jawa Barat	
61.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Jawa Tengah	
62.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I D.I. Yogyakarta	
63.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Jawa Timur	
64.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Kalimantan Barat	
65.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Kalimantan Selatan	
66.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Kalimantan Timur	
67.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Kalimantan Tengah	
68.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Sulawesi Utara	
69.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Sulawesi Tengah	
70.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Sulawesi Tenggara	
71.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Sulawesi Selatan	
72.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Bali	

NOMOR URUT :	NAMA JABATAN	NAMA BADAN	KETERANGAN
73.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Nusa Tenggara Barat.	
74.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Nusa Tenggara Timur.	
75.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Maluku	
76.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Irian Jaya	
77.	Kepala Biro Hukum	Setwilda Tk.I Timor Timur	
78.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.	
79.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Sumatera Utara, Medan.	
80.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Andalas, Padang	
81.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Riau, Pekanbaru.	
82.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Jambi, Jambi.	
83.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Sriwijaya, Palembang.	
84.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Bengkulu, Bengkulu.	
85.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Lampung, Bandar Lampung.	
86.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Indonesia, Depok.	
87.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Padjadjaran, Bandung.	
88.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Diponegoro, Semarang.	
89.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.	
90.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.	
91.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto.	
92.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Airlangga, Surabaya.	
93.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Brawijaya, Malang.	
94.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Jember, Jember.	
95.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Tanjungpura, Pontianak.	
96.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.	
97.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Mulawarman, Balikpapan.	
98.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Palangkaraya, Palangkaraya.	

NOMOR URUT :	NAMA JABATAN	NAMA BADAN	KETERANGAN
99.	Dekan Fakultas Hukum.	Universitas Sam Ratulangi, Manado.	
100.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Haluoleo, Palu.	
101.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Tadulako, Kenda- ri.	
102.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Hasanuddin, Ujungpandang.	
103.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Udayana, Denpa- sar.	
104.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Mataram, Mata- ram.	
105.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Cendana, Kupang.	
106.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Pattimura, Ambon	
107.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Cendrawasih, Jayapura.	
108.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Timor Timur, Dili.	
109.	Dekan Fakultas Syariah	I.A.I.N. Syarief Hidayatullah, Jakarta.	
110.	Kepala UPT Perpustakaan Pusat	Universitas Indonesia, Depok.	
111.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.	
112.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Tarumanegara, Jakarta.	
113.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Trisaksi, Jakarta.	
114.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Pancasila, Jakarta	
115.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Jayabaya, Jakarta	
116.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas 17 Agustus, Ja- karta.	
117.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Islam Jakarta, Jakarta.	
118.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Muhammadiyah, Jakarta.	
119.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.	
120.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Katholik Atmaja- ya, Jakarta.	
121.	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Nasional, Jakarta.	
122.	Kepala Pusat Dokumentasi Hu- kum	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Merangkap Pemandu.
123.	Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.	
124.	Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta	Pengadilan Tinggi Jakarta.	

NOMOR URUT :	NAMA JABATAN	NAMA BADAN	KETERANGAN
125.	Ketua Pengadilan Tinggi Tata U- saha Negara Jakarta	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.	
126.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	
127.	Ketua Mahkamah Pelayaran	Departemen Perhubungan.	
128.	SJDI Hukum Percontohan	Kotamadya Bandung	
129.	SJDI Hukum Percontohan	Kabupaten Bekasi	
130.	SJDI Hukum Percontohan	Kabupaten Tangerang	
131.	SJDI Hukum Percontohan	Kabupaten Wonogiri	
132.	SJDI Hukum Percontohan	Kabupaten Sampang.	
133.	Kepala Dinas Hukum POLRI	Markas Besar POLRI.	
134.	Asisten Penindakan BABINKUM ABRI.	Markas Besar ABRI.	
135.	Direktur Centre for Strategic International Studies	C.S.I.S. Jakarta	
136.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi D.I. Aceh	
137.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.	
138.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.	
139.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Riau.	
140.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Jambi	
141.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.	
142.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Bengkulu.	
143.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Lampung.	
144.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	
145.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	
146.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Jawa Te- ngah	
147.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi D.I. Jogya- karta	
148.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	
149.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.	
150.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.	
151.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.	
152.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.	
153.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.	

NOMOR URUT :	NAMA JABATAN	NAMA BADAN	KETERANGAN
154.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	
155.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	
156.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.	
157.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Bali	
158.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	
159.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	
160.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Maluku.	
161.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Irian Jaya	
162.	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Timor Timur	
163.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Kejaksaan Agung RI	Merangkap Undangan
164.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan	Kejaksaan Agung RI	Merangkap Undangan
165.	Kepala Pusat Penyuluhan Hukum	Kejaksaan Agung RI	Merangkap Undangan
166.	Kepala Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal	Kejaksaan Agung RI	Merangkap Undangan.
167.	Bambang Waluyo, SH	Kejaksaan Agung RI	Merangkap Panitia Penyiapan Materi.
168.	P. Djoko Subagio, SH	Puslitbang Kejaksaan Agung	
169.	I Wayan Suandra, SH	Puslitbang Kejaksaan Agung	
170.	Boedi Dwi Sri Marsita, SH	Puslitbang Kejaksaan Agung	
171.	Ratna Nurul Afiah, SH	Puslitbang Kejaksaan Agung	
172.	H. Gultom, SH	Staf JAM DATUN	
173.	Putu Sutedja, SH	Staf JAM DATUN	
174.	M.U. Situmeang, SH	Biro Hukum dan Humas Kejaksaan Agung	Merangkap Panitia Penyiapan Materi.
175.	R.M. Soeripto, SH	Staf Ahli Kejaksaan Agung RI	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH